Sleman Kembali Raih Penghargaan SAKIP Kemenpan RB 2023

SLEMAN (KR) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) memberikan penghargaan kepada Pemkab Sleman atas evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022.

Penghargaan diserahkan dalam kegiatan RBXperience bertempat di Nusa Dua Bali, Rabu (6/12) malam.

Dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemkab Sleman menunjukkan hasil nilai 82,75 dengan predikat A (Memuaskan).

Sekda Sleman Harda Kiswaya usai menerima penghargaan SAKIP Kemenpan RB mengatakan, tahun ini Pemkab Sleman dapat mempertahankan prestasi SAKIP dengan predikat A (Memuaskan).

KR-Istimewa

Sekda Harda Kiswaya (tengah) memperlihatkan penghargaan yang diterima Pemkab Sleman

"Alhamdulillah Pemkab Sleman masih bisa mempertahankan prestasi SAKIP tahun ini. Walaupun belum meraih nilai tertinggi (AA), dari sisi nilai, hasil evakuasi SAKIP Sleman mengalami peningatan yaitu dari 81 naik ke 82,75," jelasnya.

Hal tersebut menurut Harda merupakan sebuah prestasi dan merupakan hasil dari kerja keras berbagai pihak. Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada sekuruh pihak yang terlibat dalam akuntabilitas kinerja sehingga hasil kinerja tersebut diapresiasi Pemerintah Pusat.

"Saya berharap prestasi yang telah diraih Pemkab Sleman, dapat ditingkatkan untuk ke depannya," ujarnya. **(Has)-f**

Aman di Jalan, Utamakan Keselamatan

Danang Maharsa

KECELAKAAN lalu lintas merupakan penyebab kematian nomor 2 terbesar di dunia. Bahkan Indonesia menjadi negara peringkat ketiga di dunia dengan rasio kematian kecelakaan lalu lintas dengan jumlah korban 25.000 - 30.000 orang setiap tahunnya. Yang lebih memprihatinkan lagi jumlah tersebut didominasi korban dari usia produktif dan pelajar.

Jika dirunut lebih rinci, Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah kecelakaan lalu lintas tertinggi di DIY. Pada tahun 2021 tercatat 1.707 kejadian laka lantas dan naik hingga 2.571 kejadian di tahun 2022. Sedangkan di tahun 2023 hingga bulan November lalu tercatat 1.851 kejadian. Angka ini patut menjadi keprihatinan sekaligus peringatan bagi kita semua sehingga perlu dilakukan upaya untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas.

Untuk mengurangi kecelakaan, Pemkab Sleman berupaya memenuhi infrastruktur jalan dan perhubungan sesuai dengan standar kelayakan jalan serta pemasangan rambu lalu lintas. Setiap tahun, Dinas Perhubungan Sleman berupaya memenuhi jumlah fasilitas keselamatan berlalu lintas. Jumlah pemasangan rambu lalu lintas terus bertambah. Hingga tahun 2023, telah memasang 10 APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas), 2.082 rambu lalu lintas, 1.582 cermin tikungan, 8.721 titik penerangan jalan umum serta 100 Alat Pembatas Kecepatan.

Meski demikian, sebagian besar kecelakaan justru terjadi karena kelalaian pengguna jalan, yaitu berawal dari ketidakpatuhan terhadap peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Oleh karena itu penting menanamkan disiplin berlalu lintas sejak dini. Dinas Perhubungan Sleman juga telah bekerja sama dengan Kepolisian sigap menyelenggarakan kampanye dan sosialisasi tertib lalu lintas ke sekolah-sekolah mulai TK hingga SMA.

Upaya ini tentunya harus didukung setiap warga masyarakat. Mulai dari langkah sederhana seperti memberikan teladan tentang keselamatan berkendara, seperti mengenakan helm, jaket, masker dan sabuk keselamatan setiap akan berkendara. Kedisiplinan ini harus konsisten dilakukan, demi keselamatan penggunanya bukan demi terlihat tertib di mata petugas.

Saya mengajak setiap orang tua agar tegas tidak mengizinkan anaknya yang masih di bawah umur membawa kendaraan sendiri. Sebab berkendara bukan soal teknik mampu berkendara, tetapi juga kematangan psikis serta tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu pastikan setiap orang tua untuk menjadi duta keselamatan berlalu lintas agar tercipta tertib lalu lintas. Tentunya dengan kesadaran ini akan menurunkan angka fatalitas di jalan raya.

Saya juga mengingatkan setiap pengguna jalan untuk saling bertoleransi kepada pengguna jalan lain. Jalan raya merupakan fasilitas publik yang harus dijaga dan pergunakan berdampingan secara bijaksana. Pastikan mematuhi setiap rambu lalu lintas dan berkendara pada batas kecepatan yang telah ditentukan.

Memasuki libur akhir tahun, Natal dan tahun baru, biasanya Sleman dipadati pengunjung dari berbagai daerah sehingga menyebabkan kemacetan dan sangat rawan kecelakaan. Maka sebelum berkendara saya ingatkan untuk memastikan kendaraan dalam keadaan baik, mematuhi peraturan lalu lintas sehingga terhindar dari kecelakaan. Melalui tulisan ini, saya mengajak seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat berperan serta dalam upaya penurunan angka kecelakaan lalu lintas. Mari bersama bijak berlalu lintas, Aman di jalan, utamakan keselamatan.❑ **-f**

RESMIKAN SINIAR BERANDA SLEMAN

Kustini Bicara Soal Kemandirian Perempuan

SLEMAN (KR) - Mulai akhir 2023 ini, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman menggunakan medium siniar (podcast) untuk mempublikasikan program, kegiatan, dan kebijakan Pemkab Sleman kepada masyarakat.

KR-Istimewa

Bupati Kustini didampingi Kadiskominfo Eka Surya Prihantara meresmikan podcast Beranda Sleman.

KR-Istimewa

Bupati Kustini mengisi podcast Beranda Sleman edisi perdana.

"Alhamdulillah, hari ini Bupati meresmikan dan menjadi bintang tamu pertama di podcast Beranda Sleman. Dan ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi dan edukasi untuk masyarakat," terang Kepala Dinas Kominfo Sleman Eka Surya Prihantara di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman, Senin (4/12).

Eka menyatakan pihaknya berusaha untuk terus menyesuaikan diri dengan perkembangan tren komunikasi informasi. "Selama ini kesannya kalau program pemerintah atau birokrasi itu kalau dibuat dialog biasanya kesannya kaku dan tidak menarik. Ini tantangan besar bagi kami bagaimana bisa menyampaikan program pemerintah secara menarik," ujar Eka.

Podcast ini nantinya akan berisi obrolan dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah ataupun isu yang berkembang di masyarakat, yang dikemas dengan penyampaian ringan dan santai. "Ini salah satu upaya kita agar informasi Pemkab Sleman dapat sampai ke seluruh lapisan masyarakat," pungkas Eka.

Siniar pertama ini diisi Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo yang bicara tentang pemberdayaan perempuan. Sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati Sleman, Kustini mengatakan bahwa dirinya sebagai perempuan sangat bersemangat dalam menjalankan amanah yang diembannya. Dirinya ingin membuktikan bahwa dirinya bisa memimpin dan menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Sleman

Kustini menegaskan, perempuan harus bisa menjadi mandiri dalam segala hal, termasuk dalam hal ekonomi. Hal tersebut dilakukan agar para perempuan tidak lagi mengalami ketergantungan terhadap pihak lain. "Ketika sudah mandiri, perempuan tidak perlu takut lagi tergantung kepada laki-laki," tegasnya.

Menurutnya, perempuan yang berdaya saing dapat menjadi mandiri, dan nantinya dapat menopang perekonomian, salah satunya lewat UMKM. "Sleman sendiri UMKM-nya sudah banyak dijalankan oleh perempuan," katanya.

Kustini juga menyadari bahwa menjadi Bupati itu tidak mudah, butuh persiapan yang cukup, termasuk kondisi tubuhnya untuk menjalani rangkaian keseharian sebagai bupati. Untuk itu, ia tetap menjaga asupan makanan seperti minum jus buah, serta berolahraga. "Olahraga rutin, yang penting bergerak, seperti renang," pungkasnya. **(Has)-f**

DPRD KABUPATEN SLEMAN
SUARA WAKIL RAKYAT
Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp.(0274)868413, Fax (0274)868413

KR-Istimewa

Yani Fathurahman SPdI

KINERJA KOMISI D DPRD KABUPATEN SLEMAN

Menjamin Kesejahteraan Bagi Pamong PAUD

SLEMAN (KR) - Usia emas anak atau 'the golden age yaitu usia 0 sampai 6 tahun merupakan masa keemasan seorang manusia. Pendidikan pada rentang usia tersebut sangat menentukan perkembangan anak selanjutnya. Salah satunya melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) seperti Kelompok Bermain (KB), Tempat Penitipan Anak (TPA) maupun Sekolah PAUD Sejenis (SPS). Namun ironisnya, banyak PAUD yang kondisinya memprihatinkan karena kurangnya perhatian dari pemerintah, khususnya kesejahteraan pamong PAUD.

Anggota Komisi D DPRD Sleman Yani Fathurahman SPdI mengatakan, keberadaan PAUD ini cukup penting dalam menyongsong Indonesia emas pada 2045. Bahkan pemerintah pernah mempunyai program setiap padukuhan memiliki SPS.

"Artinya pemerintah memandang PAUD ini penting dalam memberikan rangsangan pendidikan anak usia 0-6 tahun untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani anak. Makanya dulu banyak padukuhan mendirikan KB maupun SPS," kata Yani, Rabu (6/12).

Pada Tahun 2009, di Sleman ada sekitar 700-an lembaga PAUD dan Tahun 2011 menurun menjadi 628 lembaga PAUD. Kemudian pada masa Covid-19, jumlah lembaga PAUD di Kabupaten Sleman tinggal 500. "Sekarang ini banyak PAUD yang mati suri. Kalau untuk sarana dan fasilitas tidak masalah. Namun problematikanya, kesejahteraan pamong PAUD masih jauh dari kata ideal, khususnya sekolah yang bukan yayasan besar. Kalau hanya mengandalkan bantuan dari kalurahan, jelas tidak mampu," ucap anggota Fraksi PKS ini.

Untuk pamong PAUD ini berbeda dengan guru TK, dimana pamong PAUD tidak masuk kriteria dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Guru TK masuk dalam kreteria undang-undang sehingga mempunyai kesempatan mendapatkan sertifikasi. Sedangkan pamong PAUD tidak memiliki kesempatan mendapat sertifikasi. "Mereka (Pamong PAUD) hanya mendapat insentif dari pemerintah tapi nilainya masih kecil," ucap politisi dari Geblok Wukirsari Cangkringan ini.

Yani berharap, ada kehadiran pemerintah terhadap problematika yang dihadapi oleh pamong PAUD. Di antaranya membuatkan aturan dan menjamin kesejahteraan para pamong PAUD. "Bagaimana pamong bisa memberikan layanan yang baik kalau urusan domestik (keuangan) belum jelas. Makanya perlu ada jaminan kesejahteraan bagi pamong PAUD dari pemerintah yakni insetif minimal UMK. Sehingga keberadaan PAUD ini bisa kalau mendukung status Kabupaten Layak Anak (KLA)," tegas anggota legislatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Cangkringan, Pakem dan Ngaglik ini.

KR-Istimewa

Yani (tengah) usai menerima audiensi dari Himpaudi Kabupaten Sleman.

Anggota Komisi D lainnya Respati Agus Sasangka SIP menambahkan, jika melihat potensi APBD Sleman, seharusnya eksekutif mampu meningkatkan kesejahteraan pamong PAUD. Namun pemberian insentif bagi pamong PAUD harus ada indikatornya. "Saya sepakat untuk meningkatkan kesejahteraan pamong PAUD. Tapi harus ada indikatornya supaya semua dapat mengakses. Jangan sampai yang bisa mengakses hanya PAUD yang sudah besar-besar. Tapi yang masih kecil tetap bisa mengakses," kata Ade, sapaan akrabnya.

Menurut Ade, PAUD ini merupakan pendidikan basik bagi anak usia 0 sampai 6 tahun. Untuk itu pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat fasilitas dari Pemkab Sleman. "Kalau pamong PAUD masih ada beban hidup, bagaimana mereka bisa mendidik anak bisa maksimal? Jadi kesejahteraan itu penting," tegas Ketua Fraksi PAN ini.

KR-Istimewa

Respati Agus Sasangka SIP

Di samping itu, perlu ada jembatan dari pemerintah daerah untuk menghubungkan lembaga PAUD ke perusahaan-perusahaan atau perguruan tinggi supaya mendapat 'corporate social responsibility' (CSR). Harapannya lembaga PAUD ini mendapatkan pendampaingan baik dari fasilitas, kualitas SDM dan lainnya. "Jadi perlu ada jembatan agar lembaga PAUD mendapatkan CSR dari perusahaan-perusahaan atau perguruan tinggi. Supaya keberadaan PAUD lebih maju dan berkembang," pungkas anggota legislatif dari Dapil Mlati-Gamping ini.**(Sni)-f**